



Ribuan Warga DIY Terancam Kehilangan Akses Jaminan Kesehatan

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 57.349 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Daerah Istimewa Yogyakarta dinonaktifkan akibat kebijakan pembaruan data nasional. Pemerintah daerah diminta segera memverifikasi agar warga rentan tidak kehilangan hak atas jaminan kesehatan.

Penonaktifan tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 yang menetapkan penggunaan Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kepesertaan PBI JK.

"Penyesuaian data ini mengintegrasikan berbagai sumber seperti Regsosek, P3KE, dan data dari kementerian lainnya, bukan hanya dari DTKS seperti sebelumnya," ujar Deputy Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan, Yessi Kumalasari, Jumat (13/6).

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi hilangnya akses layanan kesehatan bagi ribuan warga miskin atau rentan miskin di DIY. Peserta yang dinonaktifkan meliputi berbagai katego-

ri, seperti warga yang telah meninggal, berpindah segmen kepesertaan, atau bayi yang tak diperbarui datanya lebih dari tiga bulan.

Secara nasional, lebih dari tiga juta peserta PBI JK terdampak kebijakan ini. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah penonaktifan tertinggi, mencapai 1,07 juta peserta. Dibandingkan itu, angka di DIY tergolong kecil, namun tetap signifikan bagi pelayanan publik.

BPJS Kesehatan kini menggandeng Pemda untuk melakukan verifikasi ulang. "Ini jadi tugas bersama lintas dinas, terutama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Tujuannya agar peserta yang masih layak segera dikembalikan ke skema bantuan iuran," ujar Yessi.

Pemerintah daerah diharapkan bergerak cepat agar keputusan SK Mensos berikutnya dapat mengakomodasi peserta yang valid. "Dengan verifikasi yang akurat, kepesertaan bisa dipulihkan. Ini penting agar tidak ada warga miskin yang tercecer dari sistem perlindungan kesehatan," tegas Yessi. **(han)**